

**PENGARUH KOMPETENSI KERJA
TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DESA
(Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa)**

**Juneidy Pandey
Burhanuddin Kiyai
Joorie Ruru**

Abstract : This research will be based in the background by a problem in the pineleng Sub-district office of the Regency of minahasa in the Government apparatus work competencies influence the villages that still have not contributed optimally. Therefore it is necessary the presence of the influence of good working competencies in order to improve the performance of government apparatus of the village. Thus it can be said that the Government apparatus village in the Pineleng does not yet have adequate competence in implementing village autonomy demands appropriate mandate Law No. 6 Year 2014 so it can certainly will affect their performance in achieving the goals and objectives of Government and the development of the village. Based on the results of the study as already expressed above, it needs to be given some advice, among other things: remembering the accomplishments of the Government apparatus performance village is still low, given the still weak influence aspects of formal education and training/skill performance against government apparatus apparatus village, partially, only factors factors that influence significant working experience terhadap village government apparatus performance, meanwhile, simultaneously or together, all three of these factors (education , training and work experience) effect very significantly to the performance of the Government apparatus. Based on a summary of items 3 and 4 can be said that all the hypotheses put forward acceptable convincingly at once has justification of the underlying theories.

Keyword : *competencies, performance Government apparatus village*

Pendahuluan

Sebagai unit terbawah dari sebuah sistem pemerintahan nasional, pemerintah desa diperhadapkan pada kondisi yang sangat sulit sebagai imbas dari adanya perubahan paradigma pemerintahan dari yang sentralistik ke desentralistik seiring dengan diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyusul Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Konsekuensi logis yang menyertai diberlakukannya Undang-Undang tersebut, adalah harus dipersiapkan oleh setiap strata pemerintahan, mulai dari pemerintah nasional (pusat) sampai pemerintah desa adalah bahwa disatu sisi, pemerintah (pusat) harus bersedia memfasilitasi setiap perubahan sebagai tuntutan implementasi UU tersebut yang terjadi ditingkat pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten dan kota) bahkan pada strata pemerintahan desa, dan disisi yang

lain, pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota) dan pemerintah desa berkewajiban mempersiapkan diri untuk melakukan penataan atas tuntutan perubahan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan hak otonomi daerah (termasuk otonomi asli desa).

Salah satu unsur penting yang mendesak untuk segera dipersiapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi desa adalah aparat pemerintah desa yang memiliki kemampuan atau kompetensi yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pemerintahan yang selama ini terkesan masih relatif rendah.

Rendahnya kinerja aparat pemerintahan desa diindikasikan dengan masih banyaknya tuntutan dan keluhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, seperti pengurusan surat-surat kependudukan, surat-surat tanah, keterangan lahir dan lain-lain. Kondisi ini berlaku hampir disemua desa dalam wilayah Kecamatan Pineleng sebagai

lokasi penelitian ini. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah kemampuan atau kompetensi yang dimiliki aparat pemerintah desa itu sendiri, seperti tingkat pendidikan formal, pelatihan/keterampilan atau pendidikan non-formal, pengalaman dalam menjalankan tugas dan besarnya kontra prestasi atau kompensasi yang diterima adalah merupakan faktor-faktor yang turut menentukan sejauhmana kompetensi aparat pemerintah desa itu sendiri. Kompetensi sangat berpengaruh dalam kinerja aparat kecamatan. Konsep kompetensi bukanlah hal yang baru. Di kalangan psikologi organisasi Amerika khususnya. Gerakan kompetensi telah muncul sejak akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Istilah kompetensi sebagai terjemahan dari bahasa Inggris *competency* mempunyai pengertian yang sederhana yaitu suatu kemampuan atau kecakapan. (Wojowasito dan Poerwadarminta, 1980). Dalam interpretasi selanjutnya, di kalangan para ahli atau para penulis banyak terdapat perbedaan dalam mengartikan atau mendefinisikan kata kompetensi (*competency*) ini, tergantung dari cara pandang atau pendekatan masing-masing. Seperti telah disinggung sebelumnya, bahwa kompetensi merupakan kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar (pendidikan), pelatihan, pengalaman. Hal senada juga dikemukakan oleh Megginson, Matthews dan Banfield (1993), dengan menggunakan ungkapan seperti kompetensi dan kapabilitas untuk menggambarkan tujuan dan belajar; hingga menjadi kompeten di bidangnya atau memiliki kapabilitas menjalankan pekerjaannya.

Berdasarkan hasil prasurvei menunjukkan bahwa rata-rata aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng memiliki tingkat pendidikan formal pada jenjang SLTA kebawah, bahkan ada yang hanya tamatan Sekolah Dasar, sementara pelatihan atau pembinaan dan bimbingan

yang sempat diikuti masih relatif sangat kurang, sedangkan pengalaman kerja, rata-rata 10 tahun kebawah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pineleng belum memiliki kompetensi yang memadai dalam mengimplementasikan tuntutan otonomi desa sesuai amanah UU No. 6 Tahun 2014 sehingga dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja mereka dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintahan dan pembangunan desa. Benar-tidaknya dugaan ini akan diuji melalui penelitian ilmiah yang dirangkum dalam judul : Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (Suatu Studi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa).

METODE PENELITIAN

Sesuai dengan karakteristik masalah dan untuk pengujian hipotesis, maka metode yang relevan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan eksplanatoris survei dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai kompetensi kerja dan kinerja aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Metode eksplanatoris survei adalah metode penelitian yang bertujuan menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Singarimbun dan Effendi, 1995).

Berdasarkan perumusan hipotesis, maka penelitian ini akan mengkaji dua variabel, masing-masing (1) satu variabel bebas (Independent variable) yaitu Kompetensi kerja; dan (2) sebuah variabel tergantung/terikat atau *dependent variable* yakni kinerja aparat pemerintah desa. Adapun definisi konseptual dan definisi operasional dari kedua variabel tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kompetensi kerja sebagai variabel bebas (*independen variable*) didefinisikan sebagai segala sifat dan kemampuan pengetahuan serta keterampilan yang dimiliki seseorang (aparatur pemerintah desa) dan diperoleh atau dipelajari melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pengalaman sehingga yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan sangat berhasil.

Berdasarkan definisi konseptual tersebut maka variabel kompetensi kerja aparatur pemerintah desa secara operasional terdiri dari 3 (tiga) indikator, yaitu : Pendidikan formal, dimaksudkan adalah jenjang pendidikan formal yang berhasil ditamatkan oleh responden (aparatur pemerintah desa), yaitu : SD, SLTP, SLTA, Diploma/Akademi dan S1, dengan kategori sebagai berikut :

Tinggi adalah responden (aparatur pemerintah) yang telah menamatkan jenjang pendidikan Diploma/Akademi dan Universitas/S1; Sedang adalah responden (aparatur pemerintah) yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan SLTP dan SLTA; Rendah adalah responden (aparatur pemerintah) yang telah menamatkan jenjang pendidikan SD.

Variabel ini diukur dari lamanya responden (aparatur pemerintah desa) menjalani pendidikan (dalam tahun).

2. Pelatihan atau Pendidikan non-formal/ketrampilan adalah keikutsertaan responden (aparatur pemerintah desa) dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, bimbingan, loka karya, latihan-latihan fungsional atau latihan keterampilan dibidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa, dan lain-lain. Datanya diperoleh melalui beberapa indikator, antara lain :

frekuensi dan intensitas keikutsertaan aparatur pemerintah desa dalam kegiatan pelatihan fungsional, seperti pelatihan administrasi desa, pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa; frekuensi dan intensitas keikutsertaan responden (aparatur pemerintah desa) dalam kegiatan pembinaan, bimbingan, loka karya dan sejenisnya; tingkat kegunaan pengetahuan/materi yang diperoleh dari kegiatan pelatihan dan kursus-kursus dengan tugas pekerjaan yang diemban para responden (aparatur pemerintah desa).

Pengalaman/Pengetahuan diukur melalui pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur pemerintah desa, pengalaman dalam kerja lainnya termasuk lamanya bekerja (masa kerja).

3. Kinerja aparatur pemerintah desa sebagai variabel terikat/tergantung (variabel Y) dimaksudkan adalah tingkat prestasi kerja yang dicapai oleh aparatur pemerintah desa secara efisien dan efektif, yang berdampak pada peningkatan kinerja yang dapat mempercepat keberhasilan pembangunan desa. Variabel ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain : Jumlah hasil kerja yang dicapai dibandingkan dengan beban tugas pekerjaan yang ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu, Mutu hasil kerja (kualitas kerja) yang dicapai dibandingkan dengan standard yang ditetapkan. Tingkat penghematan dalam penggunaan waktu, tenaga, biaya dan peralatan dalam pelaksanaan tugas. Luasnya pengetahuan dan atau keterampilan mengenai pekerjaan/tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa. Tingkat keterandalan dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tingkat kepuasan aparatur pemerintah dalam melakukan pekerjaan dikaitkan dengan peralatan

dan fasilitas kerja yang tersedia. Hal-hal lain yang menyangkut aspek perilaku seperti kerjasama, disiplin, inisiatif, kreativitas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam misi pemerintahan desa.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa desa dalam wilayah Kecamatan Pineleng. Dengan demikian, populasi dalam penelitian ini ialah semua karakteristik yang berkaitan dengan Kompetensi kerja dan pengaruhnya terhadap kinerja aparat pemerintah desa dalam wilayah Kecamatan Pineleng.

Berdasarkan hasil prasurvei diketahui bahwa jumlah keseluruhan aparat pemerintah desa yang tersebar di 15 desa dalam wilayah Kecamatan Pineleng sebanyak 244 orang, terdiri dari pemerintah desa sebanyak 105 orang dan anggota BPD sebanyak 139 orang.

Adapun sampel adalah sebagian dari populasi yang dalam penelitian ini hanya dibatasi pada perangkat desa (sekretaris, kapala-kepala urusan dan kepala-kepala jaga bersama maweteng) yang ditetapkan secara purposive sampling sebesar 30 % dari jumlah perangkat desa sebanyak 244 orang. Kemudian sampel desa juga ditarik secara purposive sebanyak 4 (empat) desa. Dengan demikian besar sampel responden sebanyak 73 orang perangkat desa sebagai responden yang tersebar di empat desa sampel.

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris survei, maka Instrumen yang digunakan adalah Kuesioner atau Daftar Pertanyaan (angket) dan Interview-guide (pedoman wawancara). Instrumen-instrumen tersebut digunakan untuk menjaring data primer sesuai variabel-variabel penelitian, sementara data sekunder berupa data statistik untuk menggambarkan kondisi umum Kecamatan Pineleng dan lain-lain diperoleh melalui penelitian dokumentasi. Semua data dikumpulkan dengan metode survei dan observasi langsung.

Untuk menjawab permasalahan dan menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka teknik analisis data yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi variabel penelitian, digunakan teknik analisis tabel frekuensi atau analisis persentase.
2. Untuk menguji hipotesis nomor 1 s.d nomor 3 tentang pengaruh variabel-variabel bebas secara parsial (sendiri-sendiri) terhadap variabel terikat (variabel tergantung), digunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan menyelesaikan persamaan :

$$\hat{Y} = a + bX \dots (\text{Sudjana, 1983})$$

Dimana nilai koefisien a dan koefisien b dicari dengan rumus ,masing-masing sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{n \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Variabel Pendidikan Formal

Pendidikan formal merupakan salah satu dimensi dari kompetensi kerja apartur pemerintah desa, diamati dari jenjang pendidikan formal dengan indikator lamanya menempuh pendidikan (dalam tahun). Berdasarkan indikator tersebut selanjutnya disusun dalam saftar pertanyaan (kuesioner) kemudian didistribusikan kepada 73 responden aparat pemerintah desa yang tersebar di tiga desa sampel yang hasilnya ditabulasi dan dimasikkan. Rata-rata tingkat pendidikan formal aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng adalah tamatan SLTA, yakni sebesar 49,3%, menyusul tamatan SLTP sebesar 39,7 %, dan sisanya sebesar 8,2 % tamatan Sekolah dasar (SD), serta hanya sekitar 2,7% tamatan Perguruan Tinggi.

2. Variabel Pelatihan/Ketrampilan

Pelatihan atau Pendidikan non-formal/ketrampilan adalah keikutsertaan responden (aparatur pemerintah desa) dalam kegiatan-kegiatan pembinaan, bimbingan, loka karya, latihan-latihan fungsional atau latihan keterampilan dibidang pemerintahan dan pembangunan masyarakat desa, dan lain-lain. Datanya diperoleh melalui beberapa indikator, antara lain :

- 1) frekuensi dan intensitas keikutsertaan aparat pemerintah desa dalam kegiatan pelatihan fungsional, seperti pelatihan administrasi desa, pelatihan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- 2) frekuensi dan intensitas keikutsertaan responden (aparatur pemerintah desa) dalam kegiatan pembinaan, bimbingan, loka karya dan sejenisnya;
- 3) tingkat kegunaan pengetahuan/materi yang diperoleh dari kegiatan pelatihan dan kursus-kursus dengan tugas pekerjaan yang diembankan para responden (aparatur pemerintah desa).

Berdasarkan indikator-indikator variabel pelatihan/ ketrampilan selanjutnya dijabarkan kedalam kuesioner sebanyak 4 butir pertanyaan, kemudian disebarkan kepada 73 responden aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng. Distribusi data menunjukkan bahwa rata-rata pelatihan/ketrampilan yang dimiliki oleh aparat pemerintah desa berada pada kategori “sedang”, yakni sebanyak 28 responden atau sekitar 38,4 %, terkategori “rendah” sebesar 34,2 %, dan sisanya sebesar 27,4 % berada pada kategori “tinggi”.

3. Variabel Pengalaman kerja

Pengalaman/ Pengetahuan diukur melalui pengalaman dalam melaksanakan tugas sebagai aparat pemerintah desa, pengalaman dalam

kerja lainnya termasuk lamanya bekerja (masa kerja). berada pada kelas interval 14 – 17 atau terkategori “sedang”, yakni sebesar 60,3 %, sementara 21,9 % berada pada kategori “rendah” dan sisanya sebesar 17,8 % terkategori “tinggi”.

4. Variabel Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

Kinerja aparat pemerintah desa sebagai variabel terikat/tergantung (variabel Y) dimaksudkan adalah tingkat prestasi kerja yang dicapai oleh aparat pemerintah desa secara efisien dan efektif, yang berdampak pada peningkatan kinerja yang dapat mempercepat keberhasilan pembangunan desa.

Variabel ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain : Jumlah hasil kerja yang dicapai dibandingkan dengan beban tugas pekerjaan yang ditetapkan dalam suatu periode waktu tertentu. Mutu hasil kerja (kualitas kerja) yang dicapai dibandingkan dengan standard yang ditetapkan. Tingkat penghematan dalam penggunaan waktu, tenaga, biaya dan peralatan dalam pelaksanaan tugas. Luasnya pengetahuan dan atau keterampilan mengenai pekerjaan/tugas-tugas yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan desa. Tingkat keterandalan dan dapat dipercaya dalam menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Tingkat kepuasan aparat pemerintah dalam melakukan pekerjaan dikaitkan dengan peralatan dan fasilitas kerja yang tersedia. Hal-hal lain yang menyangkut aspek perilaku seperti kerjasama, disiplin, inisiatif, kreativitas, tanggung jawab, dan kesetiaan dalam misi pemerintahan desa.

Mengacu pada indikator-indikator tersebut di atas, selanjutnya dirumuskan kedalam kuesioner sebanyak 10 butir pertanyaan, kemudian didistribusikan kepada 73 responden aparat pemerintah desa di

kecamatan Pineleng. menunjukkan bahwa kinerja aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng masih berada pada kategori ‘rendah’, yakni sebanyak 30 responden atau sekitar 41,1 % dari 73 responden yang diwawancarai. Selanjutnya sebanyak 28 responden atau sekitar 38,4 % berada pada kategori “sedang” atau menengah, dan sisanya sebesar 20,5 % terkategori “tinggi”.

Pada prinsip, penelitian ini bertujuan untuk menerangkan/ menjelaskan pengaruh kompetensi kerja (pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja), baik secara bersama-sama maupun secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kinerja aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka pembahasan hasil penelitian diarahkan untuk menjelaskan/menerangkan sejauhmana penelitian ini telah mencapai tujuannya sekaligus mengaitkannya dengan teori-teori yang menjelaskan hal tersebut sehingga dapat diketahui, apakah fakta empirik (hasil penelitian) dapat menjustifikasi teori-teori yang mendasarinya.

Untuk maksud tersebut, berikut ini akan dibahas secara sistematis berdasarkan urutan hipotesis sebagai berikut :

1. Pengaruh Pendidikan Formal terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa

Dari hasil analisis regresi parsial (regresi sederhana) dengan persamaan $\hat{Y} = 21,044 + 0,484X_1$; dapat teruji hipotesis nomor (1) yang menyatakan bahwa “Kompetensi kerja, seperti pendidikan formal berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah desa” pada tingkat keyakinan 95 %., Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, faktor pendidikan formal berpengaruh positif dan cukup nyata terhadap kinerja aparat pemerintah desa, namun ketika dilakukan uji keberartian koefisien

regresi ganda untuk koefisien b_1 ternyata tidak signifikan pengaruh faktor pendidikan formal terhadap kinerja aparat pemerintah desa walaupun pada taraf uji 5%. Hal ini mengindikasikan bahwa secara parsial, faktor pendidikan formal cukup berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa, namun secara simultan (bersama-sama) yang merupakan satu kesatuan konsep kompetensi, maka faktor pendidikan formal ternyata tidak lagi berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa itu sendiri, karena pendidikan formal dipahami hanya sekedar sebagai salah satu persyaratan formal saja ketika seseorang ingin bekerja – termasuk menjadi aparat pemerintah desa. Jadi, fakta empirik ini menunjukkan bahwa pendidikan formal merupakan suatu keharusan (zon qua non) atau suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap aparat pemerintah desa, minimal tamat Sekolah Dasar sebagaimana disyaratkan pula oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realitas ini juga diindikasikan dengan kecilnya pengaruh (determinasi) faktor pendidikan formal terhadap kinerja aparat pemerintah desa, yakni hanya sebesar 7,6 % saja. Hal ini mengindikasikan bahwa variasi perubahan kinerja aparat pemerintah desa ditentukan oleh variasi perubahan faktor pendidikan formal hanya sebesar $\pm 7,6$ %, sedangkan sisanya sebesar 92,4 % dipengaruhi faktor lain.

Temuan di atas apabila dikaitkan dengan pendapat-pendapat atau teori-teori yang dikemukakan para ahli sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa pada tataran teoritis, pendidikan (formal) sebagai salah satu aspek pengembangan kualitas sumber daya manusia, terutama berkaitan dengan peran dan fungsi pendidikan itu sendiri sebagai salah satu faktor pembentuk perilaku, karena

pendidikan disamping sebagai suatu proses yang meneruskan pengetahuan dan keterampilan, juga untuk membangun kecakapan-kecakapan mental (Spencer dalam Goni, 1984), serta mengubah tingkah laku manusia ke arah yang diinginkan (Napitupulu, 1979), dan juga untuk membina watak seseorang (Siagian, 1988), memang berpengaruh terhadap kinerja seseorang atau sekelompok orang secara umum, namun pada tataran empiris tidak selamanya demikian. Kurang bermaknanya pengaruh pendidikan formal terhadap kinerja aparat pemerintah desa, pada tataran empiris dapat dijelaskan dengan mengemukakan beberapa indikasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

2. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa

Faktor pelatihan ternyata berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa sebagaimana ditunjukkan melalui hasil analisis regresi parsial dan regresi ganda, sekaligus telah teruji secara empirik hipotesis nomor (2) yang berbunyi "Kompetensi kerja seperti aspek pelatihan juga punya pengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah desa". Sementara itu, kontribusi faktor pelatihan terhadap kinerja aparat pemerintah desa diperoleh sebesar 27,2 %. Hal ini bermakna bahwa secara parsial, variasi perubahan kinerja aparat pemerintah desa turut dipengaruhi oleh variasi perubahan kompetensi dari aspek pelatihan yang pernah diikuti sebesar $\pm 27,2\%$, dan sisanya sebesar $\pm 72,8\%$ turut ditentukan oleh faktor lain.

Besarnya pengaruh faktor pelatihan/keterampilan terhadap kinerja aparat pemerintah desa dapat dijelaskan secara teoritis karena

pelatihan/keterampilan itu sendiri merupakan kegiatan untuk memperbaiki kemampuan kerja seseorang dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja. Pelatihan dapat membantu pegawai (termasuk aparat pemerintah desa) dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna meningkatkan keterampilan, kecakapan dan sikap yang diperlukan oleh organisasi (pemerintahan desa) dalam usaha pencapaian tujuan (Heidjerahman dan Husnan, 1980).

Pada bagian lain, menurut Mintzberg (1973) terdapat empat kemampuan (kompetensi) atau skill, yang perlu dimiliki oleh seorang pegawai (aparat) atau manajer/pimpinan organisasi, termasuk aparat pemerintah desa, yaitu : (1). Keterampilan Teknis, adalah kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang khusus, (2). Keterampilan Manusia, adalah kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, memotivasi orang lain baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok, (3). Keterampilan Konseptual, adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan dan memadukan kepentingan dan kegiatan organisasi, (4). Keterampilan Manajemen, adalah keseluruhan kemampuan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan termasuk di dalamnya kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan, melaksanakan program (pembangunan) dengan anggaran yang terbatas.

Sejalan dengan pendapat di atas, Budiandono (1986) mengemukakan bahwa pelatihan berorientasi pada penerapan dengan segera dari pada pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan formal, di mana pelatihan adalah bagian dari pada pendidikan yang sifatnya non-formal yang merupakan

proses belajar untuk memperoleh atau meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang penyelenggaraanya berlangsung diluar sistem pendidikan sekolah dan dalam waktu yang relatif singkat dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktek dari pada teori. Selanjutnya, dilihat dari peranan pelatihan dalam mengembangkan keterampilan, maka pengembangan keterampilan akan mempunyai pengaruh terhadap pembentukan perilaku. Keterampilan yang dimaksudkan di sini ialah kemampuan teknis untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Dengan demikian, pengembangan keterampilan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan secara umum, juga dilakukan secara sadar, programatis, dan sistematis, khususnya dalam bidang yang sifatnya teknis dan dalam penerapannya ditujukan kepada kegiatan-kegiatan operasional seperti yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa salah satu aspek kompetensi yang berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa adalah faktor keterampilan yang pernah diikuti. Hal ini berarti bahwa teori-teori yang menyatakan adanya hubungan atau pengaruh faktor pelatihan terhadap kinerja seseorang (termasuk aparat pemerintah desa) telah terjustifikasi secara empiris sebagaimana diperlihatkan melalui hasil penelitian ini.

3. Pengaruh Faktor Pengalaman Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa

Seperti halnya dengan faktor pelatihan, faktor pengalaman kerja bersama-sama dengan faktor lainnya juga ternyata berpengaruh positif dan nyata atau signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Hal ini diperlihatkan melalui hasil persamaan regresi parsial maupun regresi ganda

yang telah dikemukakan sebelumnya. Koefisien determinasi sebesar 0,848 bermakna bahwa besarnya kontribusi faktor pengalaman kerja terhadap kinerja aparat pemerintah desa sebesar 71,9 %. Hal ini menunjukkan bahwa variasi perubahan kinerja aparat pemerintah desa turut ditentukan oleh variasi perubahan pada peristiwa yang pernah dialami oleh aparat pemerintah desa itu sendiri, dan sisanya sebesar 28,1% turut ditentukan atau dipengaruhi oleh faktor lain.

Apabila diamati besarnya pengaruh faktor pengalaman kerja terhadap kinerja aparat pemerintah desa, maka dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa dengan berbagai peristiwa yang dialami seseorang, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, terutama dalam lingkungan kerja akan membentuk pola-pola sikap sesuai dengan esensi peristiwa yang dialaminya. Pola sikap tersebut akan diwujudkan dalam bentuk perilaku melalui aktivitas hidup dan kehidupan sehari-hari, termasuk aktivitas dalam melaksanakan tugas-tugas pokok pemerintahan desa sebagai pelayan masyarakat. Sikap dan perilaku yang dibentuk oleh pengalaman, di mana salah satu indikatornya adalah lamanya menekuni suatu pekerjaan/aktivitas berupa masa kerja akan memberikan nilai tambah tersendiri mengenai pengetahuan dan keterampilan dalam melakukan suatu tugas/pekerjaan. Ini berarti bahwa semakin lama seseorang menekuni suatu bidang pekerjaan tertentu akan semakin menambah kemampuan/keahlian yang bersangkutan dalam melakukan pekerjaan tersebut

Hasil analisis data tentang masa kerja aparat pemerintah desa di kecamatan pineleng cukup bervariasi, di mana

rata-rata pengalaman kerja aparat dilihat dari masa kerja adalah 11 tahun. menunjukkan bahwa masa kerja atau lamanya bekerja sebagai aparat pemerintah desa di kecamatan Pineleng yang terkategori tinggi sebesar 39,7 %, sementara masing-masing 30,1 % berada pada kategori “sedang dan rendah. Aparat pemerintah desa yang mempunyai masa kerja terkategori tinggi adalah mereka yang bekerja antar 13 tahun sampai dengan 18 tahun, sementara mereka yang terkategori rendah adalah aparat desa yang masa kerjanya antar 5 sampai 8 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan sementara bahwa terdapat kesejajaran antara hasil penelitian (fakta empirik) dengan teori mengenai adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara faktor pengalaman dengan kinerja aparat pemerintah desa di wilayah Kecamatan Pineleng. Hal ini bermakna bahwa dengan bekal pengalaman, seorang aparat akan mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan tepat dan benar sehingga dapat mencapai suatu tingkat keberhasilan yang optimal dalam melakukan misi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan yang dimaksud disini adalah pelayanan administratif bagi kepentingan masyarakat desa dan pemerintah di atasnya.

4. Pengaruh Kompetensi Kerja Terhadap Kinerja Tenaga Pengajar

Dari hasil penelitian dan pengujian hipotesis diketahui bahwa hipotesis nomor (4) yang menyatakan, “Kompetensi kerja seperti pendidikan, pelatihan, dan pengalaman secara bersama-sama (simultan) punya pengaruh yang positif terhadap kinerja aparat pemerintah desa”, dapat diterima dengan sangat meyakinkan. Hal ini dapat disimak melalui persamaan regresi

ganda $Y = 3,95 + 0,1174X_1 + 0,1351X_2 + 1,2493X_3$, dengan koefisien determinasi sebesar $R_{y.1234}^2 = 0,7299$.

Besarnya pengaruh secara simultan semua variabel bebas terhadap variabel tak bebas adalah 72,99 %. Ini berarti bahwa pencapaian kinerja aparat pemerintah desa sebesar 72,99 % dipengaruhi secara bersama-sama oleh faktor-faktor kompetensi kerja, seperti pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, sementara sisanya sebesar 27,01 % ditentukan oleh faktor lainnya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah desa ialah faktor pengalaman kerja, di mana secara efektif faktor pengalaman kerja memberikan sumbangan atau kontribusi terhadap kinerja aparat pemerintah desa sebesar $\pm 71,5$ %. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aparat pemerintah desa yang memiliki pengalaman kerja lebih lama, maka yang bersangkutan akan lebih mahir dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara efektif.

Secara umum, temuan hasil penelitian tersebut di atas tampaknya tidak jauh berbeda dengan pendapat beberapa ahli, di antaranya menurut Alain Mitrani (1995) bahwa kompetensi sebagai suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau sangat berhasil (*An underlying characteristic of an individual which is casually related to effective superior performance in a job*). Lebih lanjut dikatakan bahwa kompetensi mempunyai dua pengertian pokok, yaitu : (1) bidang-bidang kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang dapat diperoleh melalui proses belajar (pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja).

Kemampuan tersebut mencakup pengetahuan fungsional (seringkali kejuruan dan keahlian), dan sejumlah besar kegiatan kerja generik (seperti menentukan sasaran, membuat rencana, memberikan penyajian/presentasi) dan lain-lain. (2) kompetensi-kompetensi yang merupakan perangsang, motif atau sifat-sifat yang tertanam lebih dalam pada diri seseorang, misalnya dengan rasa percaya diri, daya tahan terhadap tekanan/ketegangan, keinginan untuk berprestasi, dan lain-lain.

Pendapat lain mengemukakan bahwa kompetensi ialah sifat, pengetahuan dan kemampuan pribadi seseorang yang relevan dalam menjalankan tugasnya secara efektif. (Megginson, Matthews dan Banfield, 1993). Hampir senada dengan pendapat-pendapat di atas, juga dikemukakan oleh Gibson dan Ivanvich (1989), bahwa kompetensi itu sama dengan kemampuan yaitu sifat lahir dan dipelajari yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaan dengan efektif.

Sehubungan dengan pengaruh kompetensi terhadap kinerja, Mintzberg (1973), menyimpulkan bahwa kompetensi yang tampak berhasil mendorong dihasilkannya beberapa kinerja unggul pada sekumpulan peran, salah satu di antaranya ialah pelayanan jasa (termasuk di dalamnya adalah jasa administratif).

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan formal aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng cukup bervariasi antara tamatan SLTP (39,7 %) sampai

SLTA (49,3 %) dan sisanya masing-masing sebesar 8,2 % adalah tamatan SD serta 2,7 % tamatan Perguruan Tinggi. Sedangkan faktor pelatihan yang pernah diikuti aparat pemerintah desa yang menghasilkan tingkat keterampilan kerja dicapai rata-rata relatif cukup, yakni sebesar 74,79 %. Sementara itu, faktor pengalaman kerja rata-rata masa kerja selama 11 tahun dengan variasi dari 5 s/d 18 tahun. Secara keseluruhan, kompetensi kerja aparat pemerintah desa berada pada kategori “sedang” atau menengah.

2. Pencapaian kinerja aparat pemerintah desa di Kecamatan Pineleng masih berada pada kategori “rendah” dengan rata-rata rata-rata capaian sebesar 52,14 %. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan prinsip pemerintahan yang baik sebagai bagian dari implementasi pemerintahan desa belum dilaksanakan secara optimal atau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tugas pokok yang paling utama adalah pemberian pelayanan administratif kepada masyarakat belum dilakukan secara efektif.
3. Secara parsial, faktor-faktor hanya faktor pengalaman kerja yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa, sementara kedua faktor lainnya (pendidikan formal dan pelatihan/keterampilan) berpengaruh tidak nyata terhadap kinerja aparat pemerintah desa. Kontribusi ketiga faktor tersebut terhadap kinerja aparat pemerintah desa, yakni masing-masing sebesar 7,6 % untuk faktor pendidikan formal, 27,2 % untuk faktor pelatihan dan 71,9 % untuk faktor pengalaman kerja. Dengan demikian, dari ketiga faktor tersebut, faktor pengalaman kerja tampaknya lebih dominan berpengaruh

terhadap kinerja aparat pemerintah desa dibanding kedua faktor lainnya.

4. Sementara itu, secara simultan atau bersama-sama, ketiga faktor tersebut (pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja) berpengaruh sangat signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah desa.

Berdasarkan simpulan pada butir 3 dan 4 dapat dikatakan bahwa semua hipotesis yang diajukan dapat diterima dengan sangat meyakinkan sekaligus telah menjustifikasi teori-teori yang mendasarinya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perlu diberikan beberapa saran, antara lain :

1. Mengingat pencapaian kinerja aparat pemerintah desa masih rendah, maka aspek-aspek kompetensi masih perlu diupayakan untuk ditingkatkan, baik melalui pembinaan maupun pelatihan/keterampilan. Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari aspek-aspek sikap, perilaku dan mentalitas aparat pemerintah desa, sementara pelatihan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dari aspek-aspek pengetahuan dan keterampilan kerja.
2. Mengingat masih lemahnya pengaruh aspek pendidikan formal dan pelatihan/keterampilan aparat terhadap kinerja aparat pemerintah desa, maka diperlukan adanya kebijakan yang riil dibidang pengembangan sumberdaya manusia apartur pemerintah desa, khususnya di Kecamatan Pineleng.

DAFTAR PUSTAKA

Alain Mitrani et al., 1995, *Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi*, Intermedia, Jakarta.

Budiandono. 1986. *Perencanaan dan penyelerangan latihan kinerja kerja*. Jakarta. Bharatakarya aksara

Goni, Jourdan, 1984, *Hubungan antara Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan di Minahasa*, Tesis Sarjana Utama, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Heidjerahman Ranupandojo dan Suad Husnan., 1980, *Manajemen Personalial*, BP-FE UGM, Yogyakarta.

Megginson, David., J.J. Matthews dan P. Banfield; 1993, *Human Resource Development*, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Mintzberg Henry., 1973, *The Nature Managerial*, Harper And Raw, NY.

Napitupulu, W.P., 1979, *Dimensi-Dimensi Pendidikan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta.Offset.

Siagian, SP., 1988, *Organisasi, Kepemimpinan, dan Perilaku Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta.

Singarimbun dan Effendi . 1995. *Metode Venelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Wojowasito, S. dan Poerwodarminto, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris*, Bandung, Ifasta, 1880 Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2002, cet. II